



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Maret 2024/Periodik - 2023)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIT KERJA** : UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : HARUN SITOMPUL
2. Jabatan : DEKAN FT
3. NHK : 514313

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 999.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 134 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA MEDAN , HASIL SENDIRI Rp. 247.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 91 m2/72 m2 di KAB / KOTA KOTA MEDAN , HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000
3. Bangunan Seluas 100 m2 di KAB / KOTA KOTA MEDAN , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
4. Tanah Seluas 318 m2 di KAB / KOTA TAPANULI TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/36 m2 di KAB / KOTA DELI SERDANG, HASIL SENDIRI Rp. 167.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 516.000.000

1. MOBIL, TOYOTA FORTUNER JEEP Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 205.000.000
2. MOBIL, SUZUKI CELERIO MINIBUS Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
3. MOBIL, HONDA BRIO MINIBUS Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
4. MOTOR, KAWASAKI SEPEDA MOTOR Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 20.500.000
5. MOBIL, DATSUN CROSS MINIBUS Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000



6. MOTOR, HONDA SCOOPY SEPEDA MOTOR Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 10.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	235.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	273.242.669
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.023.242.669
III. HUTANG	Rp.	536.553.273
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.486.689.396

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.